

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2014). *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera.
- Arikunto, S. (2013). *PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014*. Diakses pada 28 Oktober 2015, dari <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *E-Nofa, sistem baru Ditjen Pajak cegah faktur pajak fiktif*. Diakses pada 28 Oktober 2015, dari <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Siapa bilang bayar pajak susah?*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 29 Oktober 2015, dari <http://www.pajak.go.id/content/siapa-bilang-bayar-pajak-susah>
- Direktorat Jendral Pajak. (2014). *Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak Dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak*. Diakses pada 28 Oktober 2015, dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15568&hlm=7>
- Effendi, S. (2014). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2009). *PERPAJAKAN Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/Pj/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sunjoyo, Setiawan, R., Carolina, V., Magdalena, N., dan Kurniawan, A. 2013. *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984.
- Valentin, Fenny. (2015). *Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Terbaru (e-Faktur) Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPN*. Skripsi, Bandung: Universitas Kristen Maranatha.